

KEPALA DESA UNDAAN LOR
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA UNDAAN LOR,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, effisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

KEPALA DESA UNDAAN LOR
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA UNDAAN LOR,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, effisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undangn-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedomaan

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 38);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);

32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 57);

34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Di Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 46);

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);

39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);

40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);

41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 56);

42. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor (Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

43. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);

44. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2019 Nomor 5);

45. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Undaan Lor Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 4);

46. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2026 (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2025 Nomor 5).

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor Nomor 400.10.2.2/6/2025 tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR
dengan
KEPALA DESA UNDAAN LOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA UNDAAN LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNDAAN LOR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Undaan Lor Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.616.129.200,-
2. Belanja Desa	Rp	4.092.693.185,-
Surplus/(Defisit)	(Rp	476.563.985,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	476.563.985,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	476.563.985,-

Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
   b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Undaan Lor
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA UNDAAN LOR,

NURUL QOMAR

Diundangkan di Undaan Lor
pada tanggal 31 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DESA UNDAAN LOR,

HARI PURYOTO

LEMBARAN DESA UNDAAN LOR TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN LOR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.027.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.579.129.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.616.129.200,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	1.327.622.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.776.477.326,00	
5.3.	Belanja Modal	905.300.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.293.459,00	
	JUMLAH BELANJA	**4.092.693.185,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(476.563.985,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	476.563.985,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	476.563.985,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**476.563.985,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Undaan Lor, 31 December 2025

Kepala Desa Undaan Lor

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN

NURUL QOMAR

LAMPIRAN
PERATURAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN LOR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.027.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.579.129.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.616.129.200,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.144.711.514,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.838.007.789,00**	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.814.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.814.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.248.400,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.248.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	318.972.549,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.972.549,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	131.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.203.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	822.960.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	822.960.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin,RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan/miskin	33.609.840,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.609.840,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**76.700.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.300.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran /pemerintahan	21.400.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**64.847.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	62.247.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.247.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.600.000,00	PBK
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**117.457.083,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.820.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.820.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.040.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.960.500,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.960.500,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, B iaya Kliring dll)	3.696.583,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.696.583,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	67.940.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.940.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**47.699.642,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47.699.642,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.699.642,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.329.338.442,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**120.470.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	85.470.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.470.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	30.000.000,00	PAD
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	PBP
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**174.194.942,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	134.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.450.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.294.942,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.294.942,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.450.000,00	DDS, DLL, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**952.008.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	50.295.000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.295.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	63.630.000,00	PAD
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.630.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.000.000,00	PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	73.083.000,00	PAD, PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.083.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	260.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	260.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	500.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**50.000.000,00**	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	50.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**21.985.500,00**	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17.000.000,00	PAD, PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	4.985.500,00	PBP
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.500,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**10.680.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.680.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**460.349.770,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**61.460.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	61.460.000,00	DLL, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.460.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**324.850.000,00**	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	14.400.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	270.700.000,00	ADD, PAD, PBH,
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.700.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	30.750.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	9.000.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**74.039.770,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	46.355.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.355.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.644.770,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.644.770,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	10.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	10.040.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**75.000.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**60.000.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	40.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**15.000.000,00**	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	15.000.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**83.293.459,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**53.593.459,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	53.593.459,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.593.459,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**29.700.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	29.700.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.700.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**4.092.693.185,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(476.563.985,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	476.563.985,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**476.563.985,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Undaan Lor, 31 December 2025

Kepala Desa Undaan Lor

KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN

NURUL QOMAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus- Purwodadi km.8, Undaan Kudus 59372

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 400.10.2.2/6/2025

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN LOR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedomaan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2023 Nomor 38);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);

32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 57);

34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Di Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 46);

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten

Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);

39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);

40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);

41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 56);

42. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor (Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

43. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);

44. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2019 Nomor 5);

45. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Undaan Lor Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 4);

46. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2026 (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor dengan Pemerintah Desa Undaan Lor pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 bertempat di Balai Desa Undaan Lor membahas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Undaan Lor
pada tanggal 20 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,



MOCH DJAENOEL

BERITA ACARA

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :
"Memberikan Kesepakatan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026".

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Kudus, 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR

Ketua,

MOCH DJAENOEL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus - Purwodadi km.8 Undaan Kudus 59372

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : **SABTU**
TANGGAL : 20 Desember 2025
JAM : 20.00 WIB - Selesai
TEMPAT : Aula Desa Undaan Lor
ACARA : Rapat membahas Ranperdes APBDes TA 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moch Djaenoel	Ketua	1
2	Sutopo	Wakil Ketua	2
3	Muhammad Triyanto	Sekretaris	3
4	Didik Kurniawan	Anggota	4
5	Musyafa'	Anggota	5
6	Sugiyanto	Anggota	6
7	Suhartini	Anggota	7

Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor
Ketua

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN KUDUS BPD KECAMATAN UNDAAN DESA UNDAAN LOR

Moch Djaenoel

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus- Purwodadi km.8, Undaan Kudus 59372

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 400.10.2.2/7/2025

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa sesuai hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam Surat Camat Undaan Nomor 100.2.4/778/2025 tanggal 30 Desember 2025 perlu adanya Penyempurnaan tentang Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu

menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undangn-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2018 Nomor 37);

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedomaan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 38);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);

32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 57);

34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Di Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 46);

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);

39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);

40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);

41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 56);

42. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor (Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

43. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);

44. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2019 Nomor 5);

45. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Undaan Lor Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 4);

46. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2026 (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2025 Nomor 5).

Memperhatikan : 1. Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor dengan Pemerintah Desa Undaan Lor pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2025 bertempat di Aula Desa Undaan Lor membahas Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Camat Undaan Nomor 100.2.4/778/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Undaan Lor
pada tanggal 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
UNDAAN LOR

Ketua,

MOCH DJAENOEL

Wakil Ketua,

SUTOPO

Sekretaris,

MUHAMMAD TRIYANTO

BERITA ACARA

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :
"Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026".

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Deas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Kudus, 20 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR
KETUA

MOCH DJAENOEL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus - Purwodadi km.8 Undaan Kudus 59372

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : **JUMAT**
TANGGAL : 30 Desember 2025
JAM : 20.00 WIB - Selesai
TEMPAT : Aula Desa Undaan Lor
ACARA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moch Djaenoel	Ketua	1
2	Sutopo	Wakil Ketua	2
3	Muhammad Triyanto	Sekretaris	3
4	Didik Kurniawan	Anggota	4
5	Musyafa'	Anggota	5
6	Sugiyanto	Anggota	6
7	Suhartini	Anggota	7

Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor
Ketua

Moch Djaenoel